



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. LAPORAN Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Maret 2026

Pih. KEPALA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO SENTOSA, S. Mn., M.Si

NIP. 19810407 200212 1 002

# Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Penguatan Kehidupan yang Berdemokrasi Berdasarkan Pancasila”
  - Diukur dengan indikator sebagai berikut :  
“Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya”  
Formulasi Perhitungan : Jumlah Kasus Pada Tahun n dibagi Jumlah Kasus dikali 100%
  - Capaian indikator “Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya” dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial., Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.


- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100% capaiannya sama pada tahun 2025 yaitu 100%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah,  
Formulasi Perhitungan :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah
------------------------------

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi”
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%, sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 100% capaiannya sama pada tahun 2025 yaitu 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
2. Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Pemilih;
3. Meningkatkan Kualitas Lembaga Demokrasi.



Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1.Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2.Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.3.Isu-isu Strategis.....	12
1.4.Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.5.Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2025.....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025.....	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	32

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....33

# Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025 .....	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis PD ...Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD ..... Tahun 2025.....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1 .....	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja .....	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025 .....	27

## Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
Gambar II.1. Website PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10

# BAB I

## Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau 5APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **Bab I berisi :**

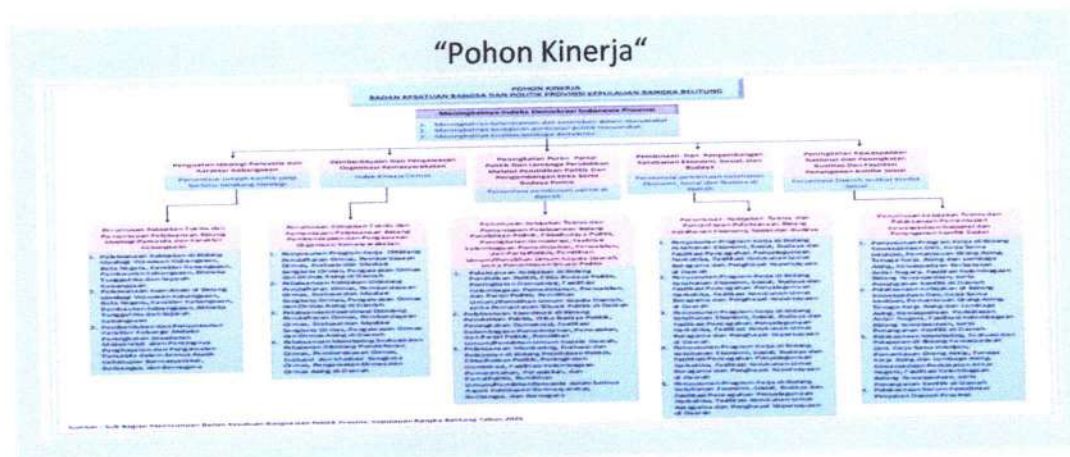
1. *Pohon Kinerja PD*
2. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

## 1.1 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat crosscuttingkaitan/hubungan dengan Instansi Lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

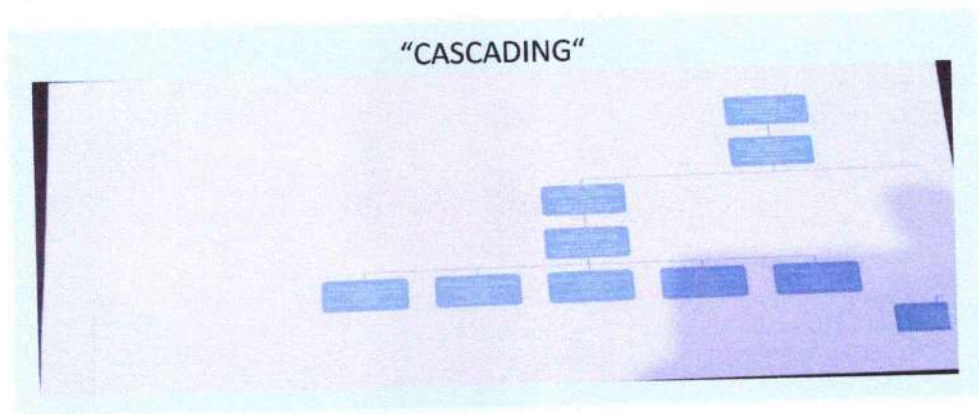
Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



## 1.2 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**



**Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui**

**link : <https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>**

### "CASCADING"



Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link :  
<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

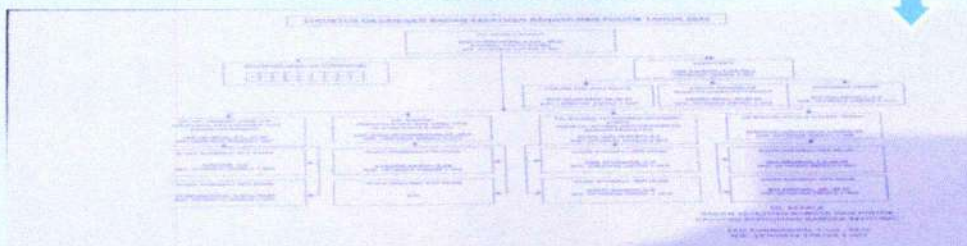


### "PETA PROSES BISNIS"



Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link :  
<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

### "STRUKTUR ORGANISASI"



Ket : Struktur Organisasi lengkap dapat dilihat melalui link :  
<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.  
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penyelenggaraan koordinasi teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan provinsi;
5. Penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Penyelenggaraan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
7. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas fungsinya.





### **1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN		
		JUMLAH		KUALIFIKASI			JUMLAH	KUALIFIKASI			SMA/SMP	LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
		S2	S1	D3	SMA/SMP	S2		S1	D3	SMA/SMP						
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>															
1	Kepala Badan	1	1				1							1		
2	Sekretaris	1	1				1								1	
3	Kepala Sub Bagian Umum	1	1				1								1	
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1	1				1							1		
5	Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1	1				1							1		
6	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1	1				1						1			1
7	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	1	1				1							1		
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>															
1	Perencana Ahli Muda	1	1				1								1	
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	1				1								1	
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	8	8				8							4		1
4	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1	1				1							1		
5	Pranata Humas Ahli Madya	1	1				1									
6	Pranata Komputer Ahli Muda	1	1				1							1		



3	Penata Layanan Operasional	4	4	4	3	3	3	1	1	2
4	Pengelola Layanan Operasional	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Operator Layanan Operasional	7	7	7	7	7	7	3	3	4

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 26 orang (55,32%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (14,9%), D3 sebanyak 1 orang (2,1%), SLTA sebanyak 12 orang (25,53%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset
<b>1</b>	<b>Tanah</b>		<b>26.145.135,00</b>
	tanah		<b>26.145.135,00</b>
<b>2</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>		<b>3.497.388.506,00</b>
	alat besar		<b>14.000.000,00</b>
	alat angkutan		<b>934.502.000,00</b>
	alat bengkel dan alat ukur		-
	alat pertanian		-
	alat kantor dan rumah tangga		<b>1.387.248.516,00</b>
	alat studio, komunikasi dan pemancar		<b>171.299.400,00</b>
	alat kedokteran dan kesehatan		-
	alat laboratorium		-
	alat persenjataan		-
	komputer		<b>990.338.590,00</b>
	alat eksplorasi		-

	Alat pengeboran		-
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		-
	alat bantu eksplorasi		-
	alat keselamatan kerja		-
	alat peraga		-
	peralatan proses/produksi		-
	rambu – rambu		-
	peralatan olah raga		-
<b>3</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>		<b>2.002.685.320,00</b>
	bangunan gedung		<b>2.002.685.320,00</b>
	monumen		-
	bangunan menara		-
	tugu titik kontrol/pasti		-
<b>4</b>	<b>Jalan, irigasi dan jaringan</b>		<b>47.600.000,00</b>
	jalan dan jembatan		-
	bangunan air		-
	instalasi		-
	jaringan		<b>47.600.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>		<b>68.950.625,00</b>
	bahan perpustakaan		<b>68.950.625,00</b>
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahra		-
	hewan		-
	biota perairan		-
	tanaman		-
	barang koleksi non budaya		-

	aset tetap dalam renovasi		-
<b>6</b>	<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>		<b>89.859.000,00</b>
	konstruksi dalam pengerjaan		<b>3.159.746.454,00</b>
<b>7</b>	<b>Aset Lainnya</b>		<b>482.894.475,00</b>
	Aset Tak Berwujud		-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		-
	Aset Lain-lain		<b>482.894.475,00</b>
	Akumulasi Penyusutan aset lain-lain		-
	BMD NON RENCANA		<b>286.504.000,00</b>
	BMD EKSTRAKOMTABLE		<b>286.504.000,00</b>
	<b>Total</b>		<b>3.355.044.356,98</b>

Kendaraan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan operasional, 2 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 90% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2010an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	70.072.481.387	637.646.400	-	-	70.710.127.787
2025	16.853.958.669	289.231.500	-	-	17.143.190.169

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 terdapat penurunan, Total anggaran belanja sebesar Rp 53.566.937.618 Tetapi anggaran yang tersedia diperuntukkan Hibah KPU dan Bawaslu sebesar 60% dari Total Hibah pelaksanaan Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



## BAB 2

# Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (Sasaran RPD yang diampu PD) Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima

tahun adalah :

1. Meningkatkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
2. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	Persen	-	75%	50%	25%	25%	100%	
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	-	66	68	70	72	72	

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kebhinekatunggalikaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan Pembinaan Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		Memperkuat Pemahaman dan Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi
		Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Pembinaan Ormas Dalam rangka Sinergitas Dengan Pemerintah
		Optimalisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3

Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
1. Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis berdasarkan Pancasila	<b>1.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	3.569.072.705	3.338.573.359	(230.499.346)
	1.1.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.569.072.705	3.338.573.359	(230.499.346)
	<b>1.2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	6.773.059.500	4.573.596.400	(2.199.463.100)
	1.2.1 Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.773.059.500	4.573.596.400	(2.199.463.100)
	<b>1.3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	143.999.800	111.288.300	(32.711.500)
	1.3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	143.999.800	111.288.300	(32.711.500)

	<b>1.4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>543.976.500</b>	<b>447.099.000</b>	<b>(96.877.500)</b>
	1.4.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	543.976.500	447.099.000	(96.877.500)
	<b>1.5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>595.873.200</b>	<b>244.242.400</b>	<b>(351.630.800)</b>
	1.5.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	595.873.200	244.242.400	(351.630.800)
	<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>	<b>21.209.618.672</b>	<b>17.143.190.169</b>	<b>(4.066.428.503)</b>

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya

adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/07/KESBANGPOL-I/2024 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

## **2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

### **2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)**

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	%	100%	Triwulan I	15%
					Triwulan II	50%
					Triwulan III	85%
					Triwulan IV	100%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	81

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp3.569.072.705	APBD
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 6.773.059.500	APBD
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 143.999.800	APBD

		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 543.976.500	APBD
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 595.873.200	APBD
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Pemerintahan Provinsi	Urusan daerah	Rp.9.583.636.967 APBD

### 2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/191/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 yaitu “agar memenuhi melakukan perbaikan indikator kinerja menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom sasaran dan indikator kinerja.

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	%	100%	Triwulan I	15%
					Triwulan II	50%
					Triwulan III	85%
					Triwulan IV	100%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan III	75

Tabel II.7 Komponen Anggaran Perubahan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.390.092.705	APBD
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 4.630.943.600	APBD
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 113.288.450	APBD
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Rp. 462.152.600	APBD

		Ekonomi, Sosial dan Budaya		
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 374.958.900	APBD
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Penunjang Pemerintahan Provinsi	Urusan Daerah	Rp. 9.207.804.971 APBD

### 2.5.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kedua)

Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	%	100%	Triwulan I	15%
					Triwulan II	50%
					Triwulan III	85%
					Triwulan IV	100%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	TW I TW II TW III TW IV	75

Tabel II.8 Komponen Anggaran Perubahan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket	
1.	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.338.573.359	APBD	
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 4.573.596..400	APBD	
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 111.288.300	APBD	
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 447.099.000	APBD	
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 244.242.400	APBD	
Nilai SAKIP Daerah	Perangkat Daerah	Penunjang Pemerintahan Provinsi	Urusan Daerah	Rp. 8.428.390.710	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Tetapi anggaran berkurang 0,8 % sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran Dekonsentrasi.

## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <http://kesbangpol.babelprov.go.id>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Gambar II.2. Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Pengukuran tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2025	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Indikator: <u>Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya</u>  Formula Perhitungan: Jumlah Kasus Pada Tahun N dibagi Jumlah Kasus dikali 100%	%	100	100	100	100	100	Sangat Baik	100
2.	Meningkatkan Tata kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,20	68,65	75	-	-	-	82

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**3.1.1. Sasaran :**

**Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila**

Kinerja sasaran Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila diukur dengan indikator Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	$\frac{\text{Jumlah Kasus pada tahun n}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Kinerja sasaran “Penguatan Kehidupan Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan “Jumlah Kasus pada tahun n dibagi jumlah kasus dikali 100%”. Tahun 2025 capaian kinerja berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian sd 2024 terhadap target 2026 %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	100	100	100	100	100	100	100	100

Analisis Ketercapaian Sasaran Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 %, sesuai target.
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 100% indikator sasaran Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila sama dengan tahun ini.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial** dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Persentase Daerah Terlibat Konflik Sosial” formula perhitungan indikator ini

adalah  $(\text{Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun Berjalan} \div \text{Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun } n) \times 100\%$ . Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 50% dari target 50% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya Peraturan daerah (Perda) dan atau Peraturan Kepala Daerah yang mendukung Implementasi Program di Lapangan,
- b. SDM yang memiliki kemampuan Intelijen Dasar, Mediasi dan Analisa Sosial yang tajam dan responsivitas yang cepat dalam menanggapi isu-isu strategis atau demonstrasi massa agar tidak berkembang menjadi kerusuhan,
- c. Adanya sinergitas Antar Lembaga, dengan dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perangkat daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terkait Sinkronisasi Program serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait,
- d. Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dimana adanya Koordinasi yang Solid dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam Deteksi Dini Konflik Sosial,
- e. Optimalisasi dan Pengaktifan peran Forum-Forum Binaan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang menjadi Mata dan telinga Pemerintahan dalam melaporkan Potensi ancaman di Tingkat Akar Rumput.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Kurangnya SDM yang berkompeten,
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung,
- c. Kurangnya anggaran.

Upaya kedepan agara indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan,
- b. Mengajukan penambahan SDM ke BKPSDMD untuk mengisi kekosongan di Peta Jabatan,
- c. Berupaya meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja,
- d. Berupaya menyusun dan menambah anggaran kegiatan dalam mendukung capaian program,
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung capaian program.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja Persentase Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi” formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi Tahun n dibagi Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Tahun n-1 dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 25% dari target 25% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan Pimpinan
- b. Sumber Daya Aparatur
- c. Kebijakan anggaran, dimana terdapat penambahan anggaran
- d. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
- e. Dukungan pihak-pihak terkait
- f. Dukungan masyarakat

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Minimnya dukungan anggaran,
- b. Sumber daya aparatur yang kurang kompeten,
- c. Lemahnya koordinasi dan komunikasi

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Dukungan aktif dari Pimpinan
- b. Dukungan anggaran yang memadai,
- c. Dukungan dan kompetensi SDM aparatur,
- d. Dukungan pihak-pihak terkait sehingga terlaksananya program kegiatan,
- e. Dukungan masyarakat sehingga terlaksananya program kegiatan,
- f. Koordinasi dan komunikasi sehingga berjalan lancarnya pelaksanaan program kegiatan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Persentase Pembinaan Politik di Daerah” formula perhitungan indikator ini adalah “Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun Berjalan dibagi Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun n-1 dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 30 dari target 30 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya Peraturan Daerah (Perda) dan atau Peraturan Kepala yang mendukung Implementasi Program di Lapangan,
- b. Telah dilaksanakannya Sinergitas Antar Lembaga, Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik dengan Badan Kesbangpol kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat terkait Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik,
- c. Dukungan SDM yang responsif dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
- d. Adanya pelaksanaan pendidikan politik dan sosialisasi politik dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilukada.

Faktor penghambat target indikator program ini adalah :

- a. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi,
- b. Kurangnya dukungan anggaran
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Meningkatkan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan,
- b. Mengajukan penambahan SDM ke BKPSDMD untuk mengisi kosongan di peta jabatan,
- c. Berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja,
- d. Berupaya menyusun dan menambah anggaran kegiatan dalam mendukung capaian program,
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

- 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Indeks Kinerja Ormas” formula perhitungan indikator ini adalah “Indeks Kinerja Ormas” Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 60 dari target nilai 60 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100%

Faktor Pendukung:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan ormas.
- b. Komitmen pengurus ormas dalam bermitra dengan pemerintah.
- c. Adanya koordinasi aktif dengan Kesbangpol.

Faktor Penghambat:

- a. Terbatasnya anggaran operasional untuk pembinaan ke lapangan.
- b. Kurangnya SDM untuk pengawasan ormas asing/khusus.
- c. Sebagian ormas tidak memperbarui data pendaftaran.

Upaya Kedepan:

- a. Meningkatkan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan ormas.
- b. Digitalisasi pendaftaran dan evaluasi ormas.
- c. Penguatan koordinasi melalui forum pertemuan ormas secara berkala.

- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** dengan sasaran kinerja program Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah” formula perhitungan indikator ini adalah “ Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tahun Berjalan dibagi Jumlah yang akan Dibina dikali 100%” Capaian kinerja untuk indikator ini  $20\% \times 100\% = 100\%$  dari target 20% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Adanya Regulasi/ peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah;
- b. Kesadaran masyarakat atas bahaya Narkoba dan semangat persatuan dan kesatuan antar umat beragama;
- c. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.

Faktor penghambat :

Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;  
Kurangnya SDM untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai :

- a. Mengajukan penganggaran agar anggaran yang diberikan dapat mengakomodir semua target kegiatan yang sudah direncanakan;
- b. Mengusulkan penambahan SDM/Pegawai untuk dapat membantu pada kegiatan yang dilaksanakan;
- c. Membuat Inovasi – inovasi baru untuk pelaksanaan kegiatan baik dalam pencegahan/pemberantasan narkoba serta dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila (Jumlah Kasus Pada Tahun n dibagi Jumlah Kasus dikali 100%)	*	100	*	100	*	100

Indikator dan target sasaran ini tidak bisa di bandingkan dengan indikator dan target nasional karena cakupan indikator nasional lebih luas daripada indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### 3.1.1.1 Data Dukung Capaian Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila

##### a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial melekat pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Pengawasan Konflik kegiatan sebagai berikut, yaitu :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp 244.242.400.-

**Gambar III.1**  
**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**  
**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Fasilitasi Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
2.		Sosialisasi Pencegahan Paham Radikalisme Terorisme
3.		Rapat Tim Terpadu Kewaspadaan Dini Daerah

4. 

Dialog Interaktif dengan Kampus sebagai ruang Pencegahan Intoleransi radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme

- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melekat pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 3.338.573.359.-

Gambar III.2  
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan  
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Apel Kehormatan dan Renungan Suci

2.		Upacara Hari Bela Negara
3.		Upacara Penaikan Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
4.		Upacara Penurunan Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

5.



Pengukuhan Paskibraka

6.



Pawai dan Karnaval  
Peringatan HUT RI

7.



Kegiatan Penanaman  
Nilai-Nilai Ideologi  
Pancasila Bagi Siswa

8.



Rapat Forum Pembauran  
Kebangsaan Se-Provinsi  
Kepulauan Bangka  
Belitung

- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik melekat pada Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidkan, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp 4.573.596.400.-

Gambar III.3

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidkan, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik

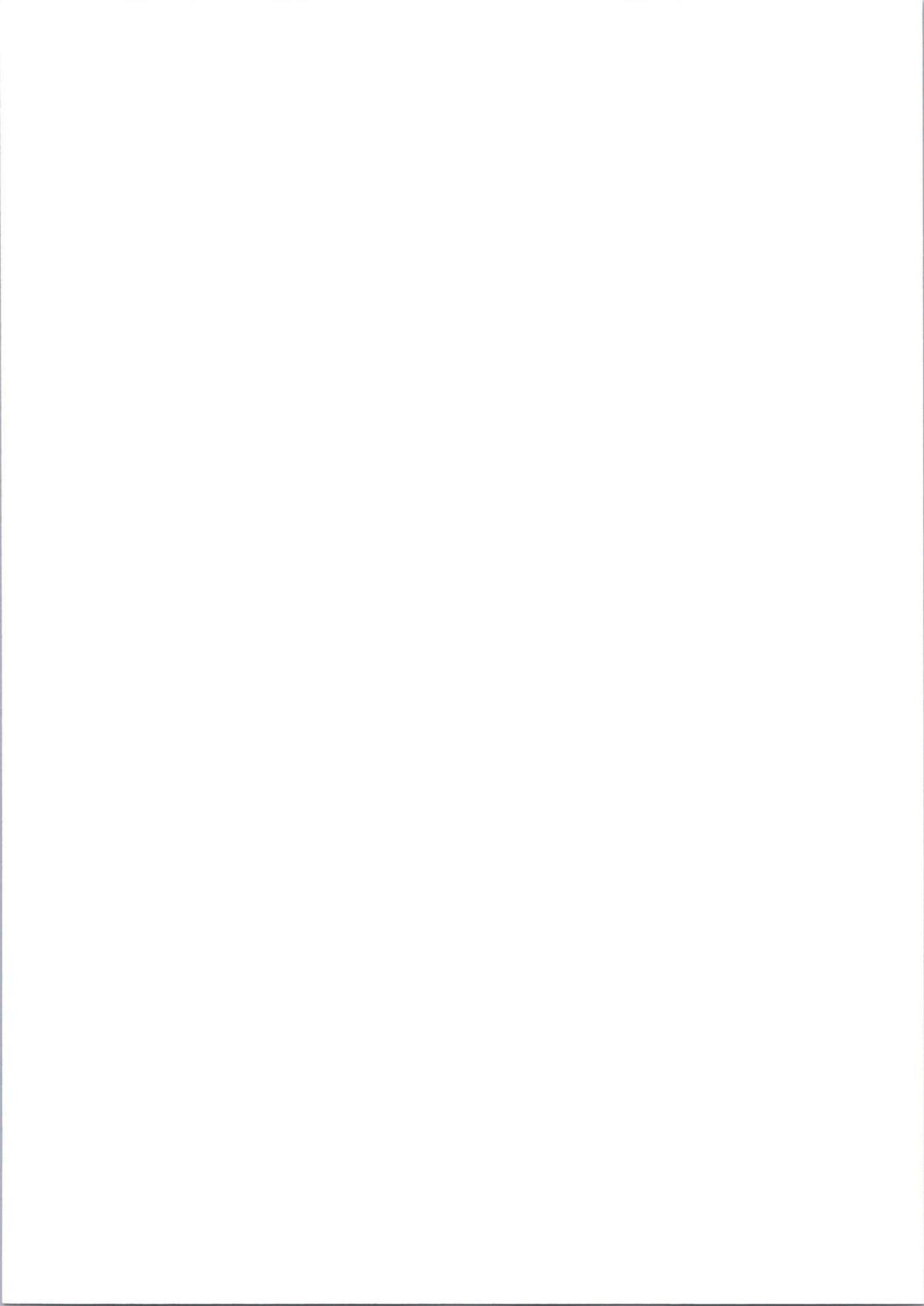
No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Rapat Penyerahan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2.	 <p><b>PROVINSI YANG MENGALAMI KENAIKAN ANGKA IDI</b></p> <p>3 Provinsi dengan kenaikan tertinggi</p> <p><b>Jambi</b> Kenaikan terjadi pada Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Aspek dengan kenaikan tertinggi adalah Aspek Kebebasan sebanyak 21,36 poin.</p> <p><b>Nusa Tenggara Barat</b> Ketiga aspek naik dengan kenaikan tertinggi pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 10,05 poin.</p> <p><b>Kepulauan Bangka Belitung</b> Kenaikan terjadi pada Aspek Kebebasan dan Aspek Kesenjangan. Aspek dengan kenaikan tertinggi adalah Aspek Kebebasan sebesar 14,40 poin.</p>	<p>Rapat Tim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>

**d. Program Pembinaan dan Pengembangan Keahanan Ekonomi, Sosial Budaya**

Program Pembinaan dan Pengembangan Keahanan Ekonomi, Sosial Budaya melekat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan anggaran sebesar Rp 447.099.000.-

**Gambar III.4**  
**Program Pembinaan dan Pengembangan Keahanan Ekonomi,**  
**Sosial Budaya melekat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama**  
**dan Kemasyarakatan**  
**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang**  
**Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya**

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Sarasehan dan Seminar P4GN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.		Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)



3.



Sosialisasi Terkait P4GN

- e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat  
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat melekat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Masyarakat sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 111.288.300.-

Gambar III.5

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat melekat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Masyarakat Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Rapat Tim Terpadu Ormas

2.		Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terdaftar di seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
----	--	---

Sasaran 2 :

**3.1.1. Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah**

Kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP . Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Kinerja sasaran “Meningkatkan tata Kelola Internal Perangkat Daerah” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 100% atau sebesar 100% dari target 100%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

**3.1 Efisiensi Anggaran**

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	100%	100%	100%	8.714.799.459	8.096.556.222	92,91%	618.243.237
2	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	75	100%	8.428.390.710	6.806.020.728	80,75%	1.622.369.982
<b>Total Belanja</b>						<b>17.143.190.169</b>	<b>14.902.576.950</b>	<b>86,93%</b>	<b>2.240.613.219</b>

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama dengan target kinerja tahun 2025 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp. 17.143.190.169 terealisasi Rp. 14.902.576.950 atau 86,93% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 2.240.613.219 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Modal
- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
- Efisiensi Belanja ATK
- Efisiensi Belanja Paket Meeting
- Efisiensi Sewa Ruang Meeting

### **3.2 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025**

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/97/LHE/ITDA/2025 tanggal 28 April 2025 Perihal laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA WAKTU	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN/DI TUPUT	REALISASI (JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN)				Link Dokumen Bukti Dukung
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Melakukan Ujicoba sehingga data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung pengukuran kinerja yang diharapkan	Melaksanakan Rapat Koordinasi Seluruh Bidang Bakesbangpol	4 Dokumen	Januari - Desember	Sedang dalam Tahap Pelaksanaan	1	1	1	1	<a href="https://drive.google.com/drive/holders/18X103rV5SBujM0AH13azJlU5jBawNBz7rusp?drive_in">https://drive.google.com/drive/holders/18X103rV5SBujM0AH13azJlU5jBawNBz7rusp?drive_in</a>
2	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Melakukan Pengawasan penyusunan Dokumen SKP Pegawai dan melakukan kegiatan pelatihan kepada Dokumen SKP Pegawai	2 Dokumen	Januari - Desember	Telah disusun SKP 2025 dan Sedang dalam Tahap Pelaksanaan Pengawasan dan Penilaian Kinerja	1	-	-	1	
3	Menyusun Laporan Kinerja dan Monitoring Evaluasi Triwulan secara berkala	Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja dan Monitoring Evaluasi Triwulan Secara Berkala	4 Dokumen	Januari - Desember	Sedang Dalam Tahap Pelaksanaan	1	1	1	1	
4	Melakukan evaluasi mandiri atas pelaksanaan SAKIP	Melakukan Rapat Internal Terhadap Hasil Pelaksanaan SAKIP	1 Dokumen	Juli	Telah dilaksanakan Rapat Internal Terhadap Rencana Aksi Tidak Lanjut (RATI) terhadap rekomendasi APip dalam LHE Nomor				1	

No	Kategori	Materi	Durasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Keterangan
5	Melakukan Sosialisasi dan Implementasi kepada seluruh pegawai sehingga sepenuhnya peduli dan menjadikan laporan kinerja pedoman dalam memperbaiki kinerja	Melaksanakan Pembinaan Pegawai	12 Laporan	Sedang dalam tahap Pelaksanaan	3	3
6	Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan	Mendokumentasikan Seluruh Kegiatan Yang Dilaksanakan	4 Laporan	Sedang Dalam tahap Pelaksanaan	1	1

Pangkalpinang, Juli 2025

Pt. KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG

*[Signature]*  
FERDIAN NERMAWAN LOEBIS, S.E., M.M.  
Pembina (Tingkat I)  
NIP. 1977065019002121006

### 3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi AWAS BABEL , untuk laporan terkait situasi kamtibmas dalam bentuk laporan situasi harian daerah.

### 3.4 Penghargaan

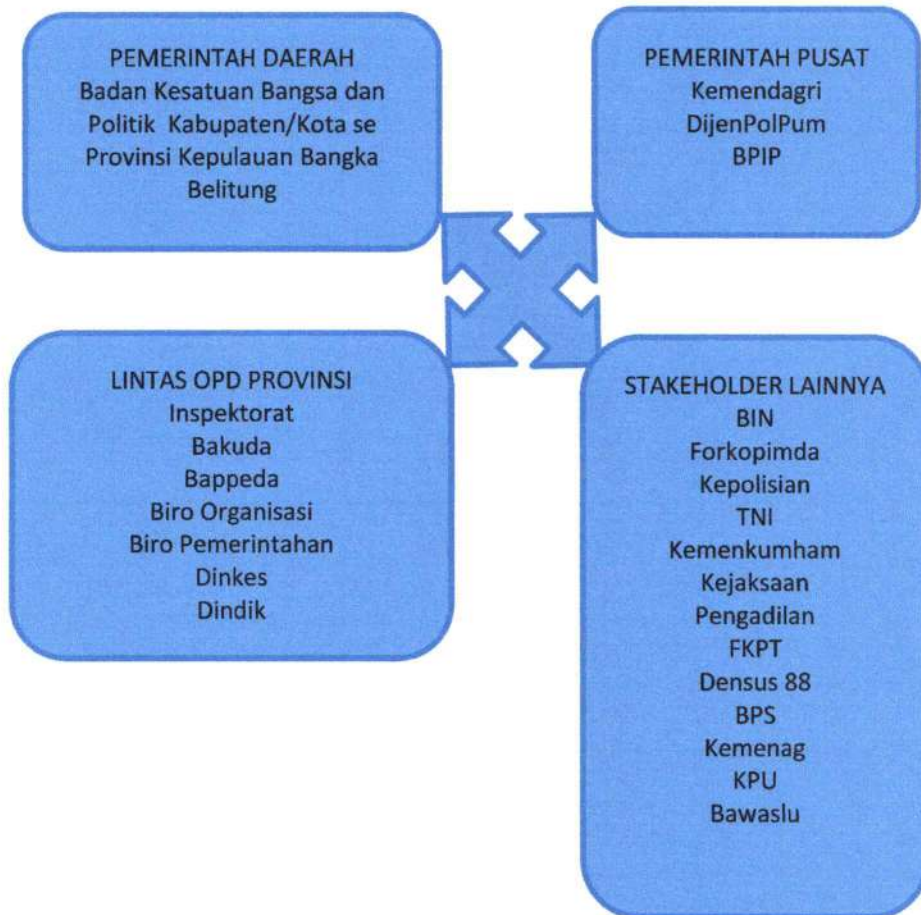
Sepanjang Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas Pembagian Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia Tahun 2025.

### 3.5 Crosscutting

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya

## CROSS CUTTING



# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

### **4.1 Kesimpulan**

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya tercapai dengan presentase 100%, dan untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai dengan presentase 100%.
2. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data perencanaan dan kegiatan untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya sistem terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kabupaten/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari berbagai stakeholder terkait untuk mendukung program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya Mencapai Target Kinerja mewujudkan Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila dan menurunkan Persentase Peristiwa Konflik Sosial.

## 4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

Meningkatkan Koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah Terorisme dan Radikalisme.

1. Memaksimalkan implementasi Perda/Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 9 Tentang 2020 dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah konflik, terorisme dan radikalisme.
2. Memaksimalkan peran Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan Peran dan Fungsi Badan Kesbangpol melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan. Disamping itu juga harus selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti TNI/POLRI, Forum-Forum Binaan, Ormas, Partai Politik dan masyarakat terhadap permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat sehingga solusi pemecahan masalahnya bisa segera diatasi.
3. Pemerintah, LSM, swasta dan stakeholders harus lebih meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, workshop, media massa ataupun fasilitas web. Penyedia layanan transportasi.
4. publik juga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang aksesibel dan ramah difabel.
5. Memaksimalkan peran aparaur dan instansi pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam hal mencegah terjadinya konflik,

- terorisme dan radikalisme.
6. Perlunya payung hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat sehingga ada kejelasan aturan dalam pemberian pelayanan, perlindungan maupun pelaporan.
  7. Memberikan penanaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan terutama bagi pelajar.
  8. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **4.3 Rencana Aksi**

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi dengan antar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih intensif.
4. Koordinasi dan komunikasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih intensif.




# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)


**Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	75%	50%	25%	25%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	66	68	70	72

## Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARU**  
 Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
 Nomor: 128/44/2017/KEPENGDAER/4/2017



**KEPUTUSAN KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARU TENTANG**  
**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SADAN KEBERSIHAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SADAN KEBERSIHAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEMULA SADRAN KEBERSIHAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Membuat**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Administrasi Negara
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2020
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2020
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2015
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2015

**Membuat**

**KESATU**

**KEDUA**

**MEMUTUSKAN**

Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Indikator Kinerja Utama sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

**METRES**

Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung

**KEPALA**  
**SADAN KEBERSIHAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



NO	RUMUSAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Kinerja Sadan			
			2017	2018	2019	2020
1	Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik	persentase pelayanan publik yang terlayani	75%	80%	75%	75%
2	Kelembagaan dan penyelenggaraan pelayanan publik	persentase pelayanan publik yang terlayani	75%	80%	75%	75%

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
 Koramil Kesbangpol  
 Kecamatan Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo  
 Kabupaten Sukoharjo

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sumber Anggaran
1	...	...	...	...

<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan I Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN I TAHUN 2025**

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sumber Anggaran
1	...	...	...	...

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2025

The document is a performance agreement for the year 2025, titled "PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 BAGIAN KEPOLISIAN MADRASAH DAN POLITER PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN". It features a header with the title and a table with the following columns: "No.", "Batasan Peningkatan", "Estimasi Kinerja", "Target Kinerja", and "Formasi Pemangkasan Target". Below this is another table for "Anggaran" with columns: "No.", "Subsumber Kinerja", "Program", "Anggaran", and "Kebijakan". The document also includes official stamps and signatures.

<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2025

The document is a monitoring and evaluation report for the first semester of 2025. It features a large table with multiple columns for tracking progress and a signature at the bottom right.

<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 2 Tahun 2024

The screenshot displays a monitoring and evaluation report for the 2nd year of the 2024 action plan. It consists of two main tables. The left table is a detailed data table with multiple columns, including headers for 'No', 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Indikator', 'Target', 'Capaian', 'Tingkat Pencapaian', 'Catatan', 'Tahun', 'Berkas', 'Monev', 'Tipe', and 'Risiko'. The right table is a smaller summary table with columns for 'No', 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Indikator', 'Target', 'Capaian', 'Tingkat Pencapaian', 'Catatan', 'Tahun', 'Berkas', 'Monev', 'Tipe', and 'Risiko'. Both tables contain handwritten data and signatures.


<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 3 Tahun 2025

The screenshot displays a monitoring and evaluation report for the 3rd year of the 2025 action plan. It consists of two main tables. The left table is a detailed data table with multiple columns, including headers for 'No', 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Indikator', 'Target', 'Capaian', 'Tingkat Pencapaian', 'Catatan', 'Tahun', 'Berkas', 'Monev', 'Tipe', and 'Risiko'. The right table is a smaller summary table with columns for 'No', 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Indikator', 'Target', 'Capaian', 'Tingkat Pencapaian', 'Catatan', 'Tahun', 'Berkas', 'Monev', 'Tipe', and 'Risiko'. Both tables contain handwritten data and signatures.

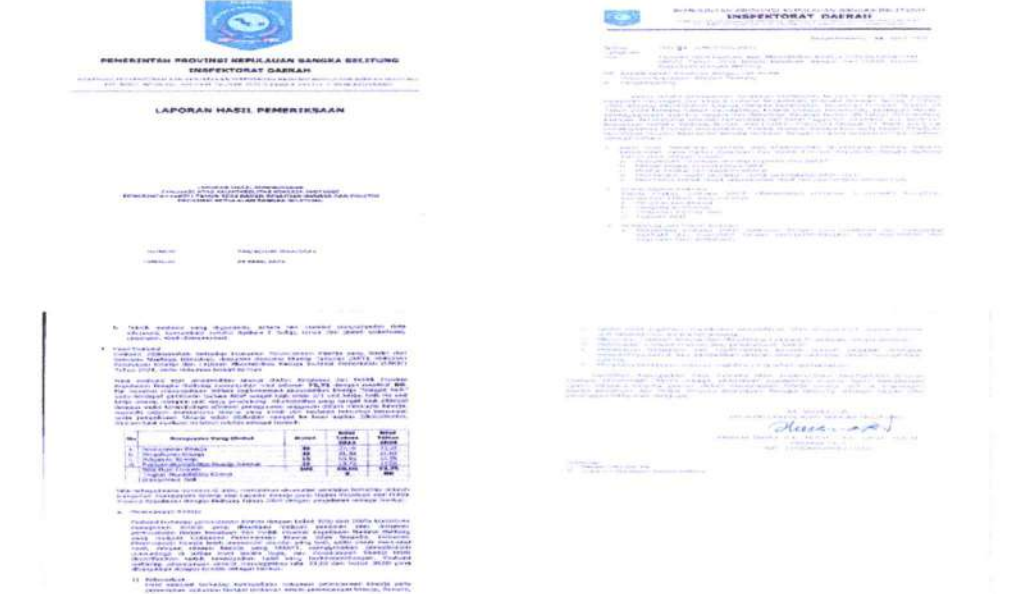
<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

Lampiran 5. Laporan Money Rencana Aksi TW 4 Tahun 2025



<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025



<https://bit.ly/LakipKesbangpol2025>

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025

REVISI DAN TINDAK LANJUT				MATERI EVALUASI KEMAMPUAN			
NO.	KOMPARASI	REVISI	SAAT	REVISI	SAAT	REVISI	SAAT
1	Menyusun dan mengkoordinasikan tim kerja yang bertugas melakukan evaluasi SAKIP PD Kabupaten Pangkep	Menyusun dan mengkoordinasikan tim kerja yang bertugas melakukan evaluasi SAKIP PD Kabupaten Pangkep	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025
2	Menyusun dan mengkoordinasikan tim kerja yang bertugas melakukan evaluasi SAKIP PD Kabupaten Pangkep	Menyusun dan mengkoordinasikan tim kerja yang bertugas melakukan evaluasi SAKIP PD Kabupaten Pangkep	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025
3	Menyusun dan mengkoordinasikan tim kerja yang bertugas melakukan evaluasi SAKIP PD Kabupaten Pangkep	Menyusun dan mengkoordinasikan tim kerja yang bertugas melakukan evaluasi SAKIP PD Kabupaten Pangkep	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025	10/08/2025

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



